



Pengaruh Digitalisasi Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Medan)

Enjri Andely Sagala¹, Hurian Kamela²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

043870781@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi laporan keuangan yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas, terhadap tingkat kepercayaan publik kepada Pemerintah Kota Medan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. Responden penelitian berjumlah 120 warga Kota Medan yang memahami dan pernah mengakses laporan keuangan digital pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Secara simultan, ketiga dimensi digitalisasi laporan keuangan tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik kepada Pemerintah Kota Medan. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 70,1% menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepercayaan publik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Model regresi juga memenuhi seluruh asumsi klasik sehingga hasil estimasi dapat dipercaya secara statistik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tata kelola pemerintahan digital serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan digital guna memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Aksesibilitas, Digitalisasi Laporan Keuangan, Kepercayaan Publik, Transparansi.

Abstract

This study aims to analyze the effect of financial reporting digitalization, which consists of three dimensions, namely transparency, accountability, and accessibility, on the level of public trust in the Medan City Government, both partially and simultaneously. The study employs a quantitative approach using an explanatory survey method to examine the relationships among the research variables. The respondents consisted of 120 residents of Medan City who understood and had accessed the local government's digital financial reports. Data were collected through questionnaires using a Likert scale. Data analysis techniques included validity testing, reliability testing, classical assumption tests covering normality, multicollinearity, and heteroscedasticity, as well as multiple linear regression analysis using SPSS version 25. The results show that transparency, accountability, and accessibility partially have positive and significant effects on public trust. Simultaneously, the three dimensions of financial reporting digitalization also have a positive and significant effect on public trust in the Medan City Government. The Adjusted R-Squared value of 70.1% indicates that transparency, accountability, and accessibility are able to explain most of the variation in public trust, while the remaining variation is influenced by other factors outside the research model. The regression model also satisfies all classical assumption tests, indicating that the estimation results are statistically reliable. These findings are expected to enrich the literature on digital government governance and provide practical input for local governments in improving the quality of digital financial reporting as an effort to strengthen public trust.

Keywords: Accountability, Accessibility, Financial Reporting Digitalization, Public Trust, Transparency.

1. Pendahuluan

Kepercayaan warga kepada pemerintah daerah adalah salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Masuknya era digital membuat tuntutan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah kian tak terelakkan, dan Pemerintah Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, turut merasakan tekanan tersebut. Minimnya kepercayaan warga atas pengelolaan keuangan pemda masih jadi PR yang belum tuntas, apalagi banyak kasus penyelewengan anggaran bermunculan di berbagai penjuru negeri.

Gelombang transformasi digital pada sektor pemerintahan telah melahirkan berbagai terobosan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Pada intinya, digitalisasi laporan keuangan adalah peralihan sistem pelaporan dari cara konvensional berbasis kertas ke format digital yang bisa diakses publik secara daring. Keberhasilan digitalisasi ini dalam menumbuhkan kepercayaan publik dapat ditelusuri lewat tiga dimensi utama: transparansi (keterbukaan informasi keuangan), akuntabilitas (pertanggungjawaban pengelolaan keuangan), dan aksesibilitas (kemudahan masyarakat menjangkau informasi tersebut).

Beberapa riset terdahulu telah menelusuri hubungan antara transparansi keuangan pemerintah dan kepercayaan publik. Meijer (2014) mendapati keterbukaan digital pemerintah cukup memengaruhi cara pandang publik atas integritas lembaga pemerintahan. Serupa dengan itu, Grimmeliikhuijsen dkk. (2013) berkesimpulan bahwa keterbukaan informasi keuangan pemerintah ikut membangun kepercayaan warga negara. Di Tanah Air, Widodo dan Sutanto (2019) mencatat penerapan sistem informasi keuangan daerah elektronik berdampak pada akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Rahayu dan Faisal (2020) mendapati kualitas informasi keuangan digital berkaitan positif dengan kepuasan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kendati demikian, celah penelitian masih terbuka lebar karena belum banyak kajian yang secara khusus memilah digitalisasi laporan keuangan ke dalam dimensi transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas sembari menguji ketiganya sekaligus dalam satu model regresi, apalagi dalam konteks Kota Medan. Berangkat dari hal itu, penelitian ini disusun guna: (1) menguji pengaruh transparansi digitalisasi laporan keuangan atas kepercayaan publik; (2) menguji pengaruh akuntabilitas digitalisasi laporan keuangan atas kepercayaan publik; (3) menguji pengaruh aksesibilitas digitalisasi laporan keuangan atas kepercayaan publik; dan (4) menguji pengaruh ketiga dimensi itu secara serentak terhadap kepercayaan publik pada Pemerintah Kota Medan.

1.1 Teori Kepercayaan Publik (Public Trust)

Kepercayaan publik dapat dimaknai sebagai konstruk multidimensi yang menggambarkan sejauh mana masyarakat percaya pada kapasitas, integritas, dan itikad baik pemerintah dalam menjalankan pelayanan serta mengelola sumber daya publik. Secara teori, gagasan ini berpijak pada teori kepercayaan institusional (institutional trust theory), yang membedakan kepercayaan kognitif, yaitu penilaian rasional atas kompetensi lembaga, dengan kepercayaan afektif, berupa perasaan positif terhadap motivasi dan nilai yang dianut lembaga (Bouckaert & van de Walle, 2003).

Dalam konteks pemerintahan, Levi dan Stoker (2000) mengartikan kepercayaan publik sebagai ekspektasi warga bahwa pemerintah bakal bertindak sesuai komitmen dan wewenang yang diembannya. Sifatnya tidak statis, melainkan terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat dengan layanan pemerintah, citra kelembagaan, serta kualitas komunikasi informasi kepada publik. Adapun teori legitimasi (legitimacy theory) menjelaskan bahwa kepercayaan publik muncul saat pemerintah dinilai mampu memenuhi harapan sosial dan norma yang berlaku, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Suchman, 1995).

1.2 Digitalisasi Laporan Keuangan

Digitalisasi laporan keuangan pemerintah daerah bisa dimaknai sebagai perubahan besar-besaran pada proses penyusunan, penyajian, dan penyebaran informasi keuangan, dari dokumen berbasis kertas ke format digital terintegrasi yang bisa diakses daring oleh semua pihak berkepentingan. Konsep ini seiring dengan semangat e-government yang mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) demi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan (OECD, 2019).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) menerangkan bahwa digitalisasi laporan keuangan pemerintah daerah terwujud lewat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan e-SAKD, ditambah portal keterbukaan informasi yang memberi akses publik atas dokumen anggaran, realisasi belanja, neraca, dan arus kas secara real-time. Bukan hanya mendongkrak efisiensi kerja internal pemerintah, langkah ini juga mengangkat mutu transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat. Nugraha dan Listiani (2021) menambahkan, sistem informasi akuntansi elektronik yang baik ikut mengangkat kualitas laporan keuangan daerah, yang pada gilirannya membangun kepercayaan publik.

1.3 Transparansi Publik

Pada ranah pemerintahan daerah, transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk membuka informasi keuangan secara akurat, lengkap, dan mudah dijangkau publik tanpa terganjal birokrasi berbelit. Setyaningrum dan Utomo (2021) menilai transparansi keuangan daerah tak sekadar soal ketersediaan dokumen anggaran, tetapi juga

menyangkut mutu penyajian agar mudah dipahami masyarakat awam. Nurdiono dan Wahyudi (2022) pun menyoroti peran portal informasi keuangan daerah dalam mempersempit kesenjangan informasi antara pemerintah dan warganya, sehingga ruang gerak penyimpangan anggaran ikut menyusut.

Semakin baik transparansi digitalisasi laporan keuangan yang dirasakan warga, semakin besar keyakinan mereka atas itikad baik pemerintah mengelola sumber daya publik. Astuti dan Prasetyo (2023) mendapati transparansi anggaran elektronik ikut mendorong naiknya kepercayaan masyarakat pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, sebab publik bisa memantau langsung realisasi belanja. Kurniawan dkk. (2024) mengemukakan hal serupa, yakni transparansi digital memperkuat persepsi akuntabilitas publik selama informasi disajikan secara konsisten dan mutakhir, sehingga hipotesis dirumuskan:

H1: Transparansi digitalisasi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik pada Pemerintah Kota Medan.

1.4 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik bisa dimaknai sebagai kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuannya kepada pihak yang berhak menuntutnya, tak terkecuali masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Ramadhan dan Kusumawati (2022) menerangkan akuntabilitas pada pelaporan keuangan digital terlihat dari ketertelusuran arus dana, konsistensi data yang dilaporkan, dan kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan. Handayani dan Saputra (2021) menambahkan, mekanisme audit yang menyatu dengan sistem pelaporan elektronik mempermudah verifikasi independen atas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Adanya jejak audit (audit trail) yang runtut dan terverifikasi pada sistem pelaporan keuangan digital membuat masyarakat lebih yakin pemerintah bertindak bertanggung jawab. Oktaviani dan Ramli (2023) menemukan hubungan positif antara penerapan akuntabilitas elektronik pada pemerintah daerah dan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama di daerah yang rutin mempublikasikan laporan pertanggungjawaban tahunan. Wulandari dkk. (2024) menegaskan akuntabilitas digital menjadi prediktor kuat kepercayaan publik, karena menjamin dana publik dikelola sesuai peruntukannya. Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis:

H2: Akuntabilitas digitalisasi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik pada Pemerintah Kota Medan.

1.5 Aksesibilitas Publik

Aksesibilitas menyangkut seberapa mudah masyarakat menjangkau, membuka, serta memanfaatkan informasi keuangan pemerintah daerah kapan saja, tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Firmansyah dan Lestari (2021) mendapati desain antarmuka, kecepatan akses, dan kompatibilitas perangkat sangat memengaruhi tingkat aksesibilitas platform digital pemerintah. Anggraini dan Pratama (2022) menambahkan, rendahnya aksesibilitas jadi salah satu penghambat utama tercapainya transparansi yang substantif, karena informasi yang secara teknis tersedia tak akan berarti jika sulit dijangkau.

Kemudahan mengakses informasi keuangan digital memberi pengalaman positif bagi pengguna, yang selanjutnya membentuk persepsi kepercayaan atas kompetensi pemerintah dalam menghadirkan layanan publik berbasis teknologi. Santoso dan Amelia (2023) membuktikan korelasi positif antara aksesibilitas sistem informasi keuangan daerah dengan kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah kota. Wijaya dkk. (2025) juga menunjukkan kemudahan navigasi dan ketersediaan data real-time pada portal keuangan daerah mendorong pemanfaatan layanan oleh publik, yang berujung pada penguatan kepercayaan institusional. Dari uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Aksesibilitas digitalisasi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik pada Pemerintah Kota Medan.

1.6 Kepercayaan Publik pada Pemerintah Daerah

Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah adalah wujud konkret dari institutional trust yang berdampak langsung pada partisipasi warga dalam demokrasi lokal, kepatuhan pada regulasi, serta legitimasi kebijakan pemerintah (Dwiyanto, 2015). Bouckaert dan van de Walle (2003) membagi kepercayaan publik ke dalam empat dimensi: kepercayaan atas kompetensi pemerintah menjalankan tugasnya, kepercayaan atas integritas moral pejabat publik, kepercayaan atas keterbukaan komunikasi kebijakan, dan kepercayaan atas akuntabilitas hasil yang dicapai.

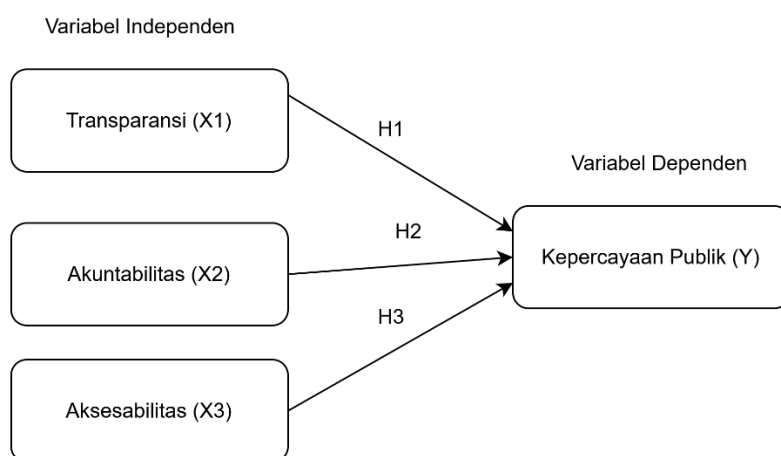
Melalui studi komparatif lintas negara, Grimmelikhuisen dkk. (2013) mendapati kepercayaan publik bersifat kontekstual, dipengaruhi faktor budaya, sejarah pemerintahan, dan kondisi sosial-ekonomi setempat. Di Indonesia, kepercayaan publik pada pemerintah daerah tergolong masih rendah, antara lain akibat tingginya persepsi korupsi dan lemahnya mekanisme akuntabilitas (Haryatmoko, 2019). Karena itu, inovasi pelaporan keuangan digital dinilai sebagai salah satu jalan strategis memulihkan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah daerah.

1.7 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi payung hukum bagi asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang atas dasar itu pemda memperoleh keleluasaan mengurus keuangannya sendiri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan APBD.

Menurut Sedarmayanti (2018), pemerintahan daerah yang berjalan baik mesti mewujudkan good governance yang mencakup keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan publik, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan hukum. Pratolo dkk. (2020) menyebut mutu laporan keuangan pemda tak lepas dari kapasitas SDM, keandalan sistem pengendalian internal, dan pemakaian teknologi informasi. Pemerintah Kota Medan, sebagai salah satu pemda berskala besar, dinilai layak diteliti karena kerumitan pengelolaan keuangannya serta langkah digitalisasi yang sudah berjalan sejak 2018 untuk mendongkrak kualitas pelaporan dan kepercayaan warga.

1.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Gambar 1 memvisualisasikan tiga sisi digitalisasi laporan keuangan yakni keterbukaan (X_1), pertanggungjawaban (X_2), dan kemudahan akses (X_3), yang berperan sebagai variabel bebas yang menentukan kepercayaan publik (Y) selaku variabel terikat di Pemerintah Kota Medan. Ketiga sisi ini berdiri sebagai konstruk masing-masing namun saling menopang dalam membangun pandangan warga soal kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Model tersebut diracik dari gabungan teori kepercayaan institusional (Bouckaert & van de Walle, 2003) dan teori legitimasi (Suchman, 1995) yang menjadikan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan akses mudah sebagai modal lahirnya legitimasi dan kepercayaan pada institusi publik.

Tanda panah pada kerangka penelitian menggambarkan arah pengaruh setiap dimensi terhadap kepercayaan publik secara terpisah (H_1 , H_2 , H_3), sekaligus pengaruh gabungan ketiganya (H_4). Pandangan ini sejalan dengan Nurdiono dan Wahyudi (2022) dan Wulandari dkk. (2024), yang menilai digitalisasi laporan keuangan lebih pas dipandang sebagai konstruk multidimensi ketimbang variabel tunggal, sebab tiap dimensi punya jalur dan mekanisme pengaruhnya sendiri terhadap kepercayaan publik. Kerangka ini kemudian diuji secara empiris lewat regresi linear berganda atas data primer responden di Kota Medan.

2. Metode Penelitian

Riset ini mengambil pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori (explanatory survey research) yang dianalisis lewat regresi berganda. Kota Medan, Sumatera Utara, dipilih sebagai lokus riset karena pemkot ini sudah menjalankan sistem pelaporan keuangan digital sejak 2018 dan menjadi rujukan digitalisasi tata kelola pemerintahan di kawasan Sumatera.

Populasi riset ini adalah warga Kota Medan yang punya pengalaman mengakses atau memahami laporan keuangan digital pemkot setempat. Penarikan sampel memakai purposive sampling dengan syarat: (1) sudah tinggal di Kota Medan minimal 2 tahun; (2) berusia sekurangnya 18 tahun; dan (3) punya pengalaman mengakses atau memahami laporan keuangan pemda. Rumus Slovin dengan margin kesalahan 5% menghasilkan angka sampel 120 orang.

Indikator pengukuran transparansi (X_1) meliputi keterbukaan publikasi laporan, kemudahan pemahaman informasi, kebaruan data, kelengkapan komponen laporan, dan kesesuaian data. Akuntabilitas (X_2) diukur dari tanggung jawab akurasi data, ketertelusuran anggaran, kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan, mekanisme audit, dan daya tanggap. Aksesibilitas (X_3) memakai indikator kemudahan akses platform, navigasi

antarmuka, ketersediaan akses tanpa batas ruang dan waktu, kemudahan unduh data, serta minimnya kendala teknis. Kepercayaan publik (Y) diukur mengikuti dimensi Bouckaert dan van de Walle (2003) yaitu kompetensi, integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas pemerintah. Keempatnya diukur dengan skala Likert lima poin yang terangkum dalam 20 pernyataan.

Pearson Product Moment dipakai untuk uji validitas ($r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}} = 0,361$; $n = 120$; $\alpha = 5\%$), sementara Cronbach Alpha ($> 0,70$) dipakai untuk uji reliabilitas. Uji asumsi klasik mencakup: (1) normalitas via One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Asymp. Sig. $> 0,05$); (2) multikolinearitas dengan Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 ; serta (3) heteroskedastisitas via uji Glejser (Sig. $> 0,05$). Model regresi: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$. Hipotesis diuji lewat uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (Adjusted R^2), seluruhnya diolah memakai SPSS versi 25.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Dari data yang terkumpul melalui kuesioner terhadap 120 responden, diperoleh gambaran karakteristik responden seperti tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Frekuensi (%)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	65 (54,2%)
Perempuan	55 (45,8%)
Usia	
18-25 tahun	38 (31,7%)
26-35 tahun	42 (35,0%)
36-45 tahun	25 (20,8%)
> 45 tahun	15 (12,5%)
Profesi	
ASN	30 (25,0%)
Akademisi/Mahasiswa	40 (33,3%)
Pelaku Usaha	28 (23,3%)
Masyarakat Umum	22 (18,3%)

Sumber: diolah dari data primer (2026)

Tabel 1 menunjukkan responden penelitian didominasi laki-laki (54,2%), dengan rentang usia terbanyak 26-35 tahun (35,0%), kelompok usia produktif yang cenderung melek digital. Dari sisi profesi, responden terbanyak berasal dari akademisi/mahasiswa (33,3%), disusul ASN (25,0%), pelaku usaha (23,3%), dan masyarakat umum (18,3%). Sebaran ini menandakan responden penelitian cukup memahami isu tata kelola keuangan daerah serta pemanfaatan layanan digital pemerintah, sehingga penilaian mereka atas digitalisasi laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan.

Beragamnya usia dan profesi responden turut memperkuat keterwakilan data, sebagaimana ditekankan Handayani dan Saputra (2021) bahwa keterlibatan berbagai segmen masyarakat penting dalam menilai efektivitas transparansi dan akuntabilitas digital pemerintah daerah. Sebelum data karakteristik ini dipakai untuk uji hipotesis, instrumen penelitian lebih dulu diuji validitas dan reliabilitasnya, agar alat ukur yang dipakai benar-benar mencerminkan konstruk transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kepercayaan publik yang diteliti. Hasil uji validitas 20 item pernyataan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r hitung	Keterangan
Transparansi (X ₁)	X _{1.1}	0,612	Valid
	X _{1.2}	0,578	Valid
	X _{1.3}	0,654	Valid
	X _{1.4}	0,589	Valid
	X _{1.5}	0,601	Valid
Akuntabilitas (X ₂)	X _{2.1}	0,523	Valid
	X _{2.2}	0,498	Valid
	X _{2.3}	0,567	Valid
	X _{2.4}	0,612	Valid
	X _{2.5}	0,541	Valid
Aksesibilitas (X ₃)	X _{3.1}	0,587	Valid
	X _{3.2}	0,634	Valid
	X _{3.3}	0,521	Valid
	X _{3.4}	0,598	Valid
	X _{3.5}	0,612	Valid
Kepercayaan Publik (Y)	Y.1	0,601	Valid
	Y.2	0,578	Valid
	Y.3	0,654	Valid
	Y.4	0,589	Valid
	Y.5	0,612	Valid

Catatan: nilai r tabel (n = 120; $\alpha = 0,05$) sebesar 0,361. Sumber: data primer, diolah peneliti (2026)

Tabel 2 memaparkan validitas 20 item pernyataan pengukur variabel transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kepercayaan publik. Nilai r hitung berkisar antara 0,498 sampai 0,654; tertinggi pada item X_{1.3} (0,654), menunjukkan indikator kebaruan data pada dimensi transparansi paling kuat merepresentasikan konstruksinya. Nilai r hitung terendah ada pada item X_{2.2} (0,498), tapi tetap melampaui ambang r tabel sehingga tak perlu disingkirkan dari instrumen.

Karena seluruh item memiliki r hitung di atas r tabel (0,361), semuanya dinyatakan valid dan layak dipakai mengukur konstruk penelitian. Ini sejalan dengan Ghozali (2018), yang menyebut validitas konstruk memadai jadi syarat mutlak sebelum instrumen dipakai dalam analisis regresi, sebab kesalahan pengukuran pada tahap ini bisa memicu bias hasil estimasi. Setelah validitas terpenuhi, langkah berikutnya adalah menguji konsistensi internal lewat uji reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi (X ₁)	0,834	Reliabel
Akuntabilitas (X ₂)	0,812	Reliabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Aksesibilitas (X_3)	0,798	Reliabel
Kepercayaan Publik (Y)	0,856	Reliabel

Catatan: instrumen dinyatakan reliabel jika Cronbach's Alpha > 0,70. Sumber: hasil olahan data primer (2026)

Tabel 3 menunjukkan transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kepercayaan publik masing-masing memiliki Cronbach's Alpha 0,834; 0,812; 0,798; dan 0,856. Karena seluruhnya melampaui ambang 0,70, instrumen dinyatakan reliabel dan mampu menghasilkan pengukuran konsisten bila dipakai berulang pada kondisi serupa. Reliabilitas tertinggi ada pada variabel kepercayaan publik (0,856), menandakan keseragaman persepsi responden yang cukup tinggi pada item pengukur variabel tersebut.

Skor rata-rata transparansi (mean = 3,91; SD = 0,498), akuntabilitas (mean = 3,78; SD = 0,523), dan aksesibilitas (mean = 3,84; SD = 0,501) tergolong tinggi, sedangkan kepercayaan publik cukup tinggi (mean = 3,62; SD = 0,489). Tingginya skor ketiga dimensi digitalisasi laporan keuangan ini menandakan penilaian responden yang cenderung positif atas kualitas transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas laporan keuangan digital Pemerintah Kota Medan, sejalan dengan Astuti dan Prasetyo (2023) bahwa persepsi positif atas mutu informasi digital berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

Keterangan	Nilai
N	120
Kolmogorov-Smirnov Z	0,072
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,187

Catatan: data dinyatakan berdistribusi normal jika Asymp. Sig. (2-tailed) melebihi 0,05. Sumber: diolah dari data primer (2026)

Tabel 4 menampilkan hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test atas residual model regresi dengan N sebanyak 120; nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,072 menandakan penyimpangan kecil antara distribusi data residual dan distribusi normal teoretis.

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,187 yang melampaui 0,05 menandakan data residual berdistribusi normal, memenuhi salah satu asumsi klasik regresi linear berganda. Hal ini penting supaya hasil uji t dan uji F bisa dimaknai secara valid, mengingat Ghozali (2018) menyebut pelanggaran asumsi normalitas berpotensi membuat simpulan statistik menjadi bias. Hasil uji multikolinearitas selanjutnya ada pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Transparansi (X_1)	0,612	1,634	Bebas Multikol.
Akuntabilitas (X_2)	0,587	1,704	Bebas Multikol.
Aksesibilitas (X_3)	0,658	1,520	Bebas Multikol.

Catatan: gejala multikolinearitas dinyatakan tidak ada jika Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Sumber: data primer penelitian, diolah (2026)

Tabel 5 memaparkan uji multikolinearitas dengan nilai Tolerance dan VIF masing-masing 0,612 dan 1,634 untuk transparansi; 0,587 dan 1,704 untuk akuntabilitas; serta 0,658 dan 1,520 untuk aksesibilitas.

Karena Tolerance seluruh variabel di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, tak ada gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Artinya transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas adalah konstruk yang independen secara statistik, kendati secara konsep ketiganya sama-sama dimensi digitalisasi laporan keuangan. Terpenuhinya asumsi ini menjamin koefisien regresi tiap variabel bisa dimaknai terpisah, tanpa distorsi akibat korelasi berlebihan antarvariabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	1,245	0,215	-
Transparansi (X_1)	0,842	0,401	Bebas Heterosked.
Akuntabilitas (X_2)	-1,124	0,263	Bebas Heterosked.

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Aksesibilitas (X_3)	0,756	0,451	Bebas Heterosked.

Catatan: model dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika Sig. > 0,05. Sumber: data primer, diolah peneliti (2026)

Tabel 6 memuat hasil uji Glejser terhadap nilai absolut residual dan variabel independen: t hitung dan signifikansi masing-masing 0,842 dan 0,401 untuk transparansi; -1,124 dan 0,263 untuk akuntabilitas; serta 0,756 dan 0,451 untuk aksesibilitas.

Karena signifikansi seluruh variabel melampaui 0,05, model regresi terbebas dari heteroskedastisitas, artinya varians residual homogen pada tiap tingkat variabel independen. Dengan terpenuhinya asumsi ini, seluruh uji asumsi klasik telah dilalui sehingga regresi linear berganda dapat diteruskan tanpa risiko bias estimasi.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t hitung	Sig.
Konstanta (a)	0,385	0,194	-	1,987	0,049
Transparansi (X_1)	0,298	0,062	0,331	4,821	0,000
Akuntabilitas (X_2)	0,276	0,065	0,307	4,213	0,000
Aksesibilitas (X_3)	0,241	0,067	0,269	3,587	0,001

Sumber: data primer penelitian, diolah (2026)

Tabel 7 memaparkan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas terhadap kepercayaan publik secara terpisah, dengan persamaan regresi $Y = 0,385 + 0,298X_1 + 0,276X_2 + 0,241X_3$. Uji t menunjukkan signifikansi transparansi ($t = 4,821$; Sig. = 0,000), akuntabilitas ($t = 4,213$; Sig. = 0,000), dan aksesibilitas ($t = 3,587$; Sig. = 0,001), semuanya di bawah 0,05 sehingga ketiga hipotesis parsial (H_1 , H_2 , H_3) diterima. Transparansi memiliki koefisien beta terbesar (0,331), menunjukkan kontribusinya paling dominan atas kepercayaan publik. Besaran kontribusi variabel independen selanjutnya diukur lewat koefisien determinasi (Tabel 8).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R ²	Std. Error
0,842	0,709	0,701	0,269

Sumber: hasil olahan data primer (2026)

Tabel 8 menunjukkan nilai R sebesar 0,842, menandakan hubungan yang sangat erat, sedangkan Adjusted R² sebesar 0,701 berarti 70,1% variasi kepercayaan publik dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Pengaruh simultannya diuji lewat uji F (Tabel 9).

Tabel 9. Hasil Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresi	42,318	3	14,106	94,527	0,000
Residual	17,312	116	0,149		
Total	59,630	119			

Sumber: data primer, diolah peneliti (2026)

Tabel 9 memaparkan hasil uji F (ANOVA) untuk pengujian simultan: nilai F sebesar 94,527 dengan Sig. = 0,000, di bawah 0,05, sehingga H_4 diterima, artinya transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik pada Pemerintah Kota Medan.

3.2 Pembahasan

Temuan riset memperkuat gambaran bahwa keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kemudahan akses digitalisasi laporan keuangan sama-sama berdampak positif dan bermakna atas kepercayaan warga kepada Pemerintah Kota Medan. Besarnya andil dimensi keterbukaan ($\beta = 0,331$) senada dengan hasil Grimmeliikhuijsen dkk. (2013), yang mencatat keterbukaan informasi pemerintah via kanal digital mengerek persepsi positif publik atas integritas

serta kapasitas pemerintah, sejalan pula dengan Meijer (2014) yang menonjolkan keterbukaan sebagai kunci pemerintahan digital.

Pada dimensi akuntabilitas, hasil ini selaras dengan Widodo dan Sutanto (2019), yang menyebut sistem informasi keuangan daerah elektronik meningkatkan akuntabilitas pelaporan sekaligus berdampak positif pada kepercayaan pemangku kepentingan. Mekanisme verifikasi dan ketertelusuran anggaran lewat platform digital meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah Kota Medan bertanggung jawab mengelola keuangan daerahnya.

Pada dimensi aksesibilitas, temuan ini sejalan dengan Rahayu dan Faisal (2020), yang mendapati kemudahan mengakses informasi keuangan digital berpengaruh positif pada kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Meski kontribusinya paling kecil, aksesibilitas tetap jadi prasyarat penting, sebab tanpa kemudahan akses, manfaat transparansi dan akuntabilitas takkan dirasakan masyarakat.

Adjusted R² sebesar 70,1% menandakan daya jelas model yang tinggi, namun masih menyisakan ruang bagi variabel lain, seperti kualitas pelayanan publik, rekam jejak pemerintah, dan persepsi korupsi, untuk ditelusuri pada penelitian mendatang.

4. Simpulan dan Saran

Naskah ini membuktikan digitalisasi laporan keuangan, yang terurai atas tiga sisi yakni keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kemudahan akses, punya andil terhadap kepercayaan publik di Pemerintah Kota Medan, ditinjau baik sendiri-sendiri maupun serentak. Regresi berganda atas 120 responden memperlihatkan keempat hipotesis (H1-H4) terbukti benar, menandakan ketiga sisi tersebut secara konsisten ikut membentuk kepercayaan publik.

Transparansi digitalisasi laporan keuangan terbukti memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik ($t = 4,821$; $\text{Sig.} = 0,000$), dengan sumbangan terbesar di antara ketiga dimensi ($\text{Beta} = 0,331$). Ini membuktikan keterbukaan informasi keuangan daerah yang disajikan secara digital menjadi faktor paling dominan dalam menumbuhkan keyakinan masyarakat atas integritas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Medan, selaras dengan teori kepercayaan institusional yang menjadikan keterbukaan sebagai fondasi legitimasi lembaga publik.

Akuntabilitas digitalisasi laporan keuangan pun terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik ($t = 4,213$; $\text{Sig.} = 0,000$; $\text{Beta} = 0,307$). Ini menandakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terlusuri lewat sistem pelaporan elektronik memberi jaminan bahwa dana publik dikelola sesuai peruntukannya, sehingga memperkuat persepsi kredibilitas pemerintah daerah.

Aksesibilitas digitalisasi laporan keuangan turut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik ($t = 3,587$; $\text{Sig.} = 0,001$; $\text{Beta} = 0,269$), meski sumbangannya paling kecil di antara ketiga dimensi. Ini menegaskan bahwa kemudahan masyarakat menjangkau serta memanfaatkan informasi keuangan digital tetap jadi prasyarat penting, sebab transparansi dan akuntabilitas tak akan dirasakan manfaatnya oleh publik jika informasinya sulit diakses.

Diuji secara bersamaan, ketiga sisi digitalisasi laporan keuangan tadi punya dampak bermakna atas kepercayaan publik ($F = 94,527$; $\text{Sig.} = 0,000$), menyumbang 70,1% (Adjusted R²), sementara 29,9% sisanya berasal dari faktor-faktor lain yang tak masuk model ini. Besarnya angka sumbangan ini menunjukkan model yang memecah digitalisasi laporan keuangan jadi tiga dimensi terukur punya kekuatan prediksi yang baik atas kepercayaan publik pada pemda.

Implikasi Penelitian. Secara teori, riset ini menambah wawasan literatur tata kelola pemerintahan digital dengan menegaskan digitalisasi laporan keuangan semestinya dipandang sebagai konstruk multidimensi, bukan variabel tunggal, sebab transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas menempuh jalur pengaruh berlainan terhadap kepercayaan publik. Secara praktis, temuan ini mengisyaratkan Pemerintah Kota Medan perlu mendahulukan peningkatan mutu transparansi platform digital laporan keuangan, tanpa melupakan penguatan akuntabilitas dan kemudahan akses, demi memaksimalkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang layak dicermati saat memaknai hasil maupun generalisasinya. Pertama, desain cross-sectional yang dipakai hanya menangkap persepsi responden pada satu titik waktu sehingga belum menggambarkan dinamika kepercayaan publik dari waktu ke waktu. Kedua, teknik purposive sampling dengan 120 responden berdomisili di Kota Medan membuat generalisasi temuan terbatas pada konteks pemerintah daerah lain yang berlainan karakteristik sosial-ekonomi maupun tingkat digitalisasinya. Ketiga, model penelitian ini hanya melibatkan tiga variabel independen, sehingga 29,9% variasi kepercayaan publik yang belum terjelaskan berpeluang dipengaruhi faktor lain, seperti kualitas pelayanan publik, rekam jejak pemerintah, dan persepsi korupsi. Pemerintah Kota Medan disarankan mendahulukan peningkatan transparansi platform digital laporan keuangan tanpa mengabaikan penguatan akuntabilitas dan aksesibilitas, sementara penelitian mendatang disarankan menempuh desain longitudinal, memperluas cakupan wilayah kajian, dan menyertakan variabel lain seperti kualitas pelayanan publik atau persepsi korupsi guna mempertajam daya jelas model.

Referensi

1. Anggraini, R., & Pratama, D. (2022). Aksesibilitas informasi keuangan daerah berbasis website dan pengaruhnya terhadap transparansi pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola Pemerintahan*, 5(2), 101–115.
2. Astuti, N., & Prasetyo, B. (2023). Transparansi anggaran elektronik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 33–47.
3. Bouckaert, G., & van de Walle, S. (2003). Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of 'good governance': Difficulties in linking trust and satisfaction indicators. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 329–343. <https://doi.org/10.1177/0020852303693007>
4. Dwiyanto, A. (2015). Reformasi birokrasi kontekstual: Kembali ke jalur yang benar. Gadjah Mada University Press.
5. Firmansyah, A., & Lestari, D. (2021). Desain antarmuka dan aksesibilitas portal keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 3(2), 88–99.
6. Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
7. Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The effect of transparency on trust in government: A cross-national comparative experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586. <https://doi.org/10.1111/puar.12047>
8. Handayani, R., & Saputra, A. (2021). Mekanisme audit elektronik dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 20–34.
9. Haryatmoko. (2019). Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi. PT Gramedia Pustaka Utama.
10. Hood, C., & Heald, D. (Eds.). (2006). *Transparency: The key to better governance?* Oxford University Press.
11. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Panduan implementasi digitalisasi laporan keuangan pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
12. Kurniawan, A., Hidayat, R., & Nugroho, S. (2024). Transparansi digital dan persepsi akuntabilitas publik pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 55–70.
13. Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review of Political Science*, 3(1), 475–507. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475>
14. Meijer, A. (2014). Transparent government: Parliamentary and legal accountability in an information age. *Information Polity*, 8(1–2), 67–78. <https://doi.org/10.3233/IP-2003-0014>
15. Nugraha, J., & Listiani, W. (2021). Pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis elektronik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 7(1), 45–58.
16. Nurdiono, & Wahyudi, T. (2022). Digitalisasi laporan keuangan daerah sebagai instrumen pengurangan asimetri informasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 210–224.
17. OECD. (2019). Digital government review of Brazil: Towards the digital transformation of the public sector. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264307636-en>
18. Oktaviani, D., & Ramli, M. (2023). Akuntabilitas elektronik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Akuntabilitas*, 6(1), 15–29.
19. Pratolo, S., Sofyani, H., & Anwar, M. (2020). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 21(1), 18–32.
20. Ramadhan, F., & Kusumawati, I. (2022). Ketertelusuran arus dana dan akuntabilitas pelaporan keuangan digital pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Sektor Publik*, 4(2), 77–90.
21. Rahayu, S., & Faisal, M. (2020). Pengaruh kualitas informasi keuangan digital terhadap kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 112–127.
22. Santoso, B., & Amelia, R. (2023). Aksesibilitas sistem informasi keuangan daerah, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 40–54.
23. Sari, D. A., & Purwanto, A. (2022). Transparansi digital dan kepercayaan publik: Studi pada pemerintah daerah di Jawa. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 4(1), 78–94.
24. Sedarmayanti. (2018). *Good governance: Kepemerintahan yang baik*. CV Mandar Maju.
25. Setyaningrum, D., & Utomo, S. (2021). Kualitas penyajian informasi keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(1), 1–14.
26. Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
27. Widodo, H., & Sutanto, B. (2019). Implementasi sistem informasi keuangan daerah elektronik (e-SAKD) dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 65–82.
28. Wijaya, K., Hartono, B., & Salsabila, N. (2025). Kemudahan navigasi portal keuangan daerah dan penguatan kepercayaan institusional. *Jurnal Teknologi dan Tata Kelola Pemerintahan*, 2(1), 12–27.
29. Wulandari, S., Nasution, F., & Ardiansyah, R. (2024). Akuntabilitas digital sebagai prediktor kepercayaan publik pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 6(1), 60–75.
30. Yusuf, M. (2022). Transformasi digital birokrasi pemerintahan: Tantangan dan peluang di era industri 4.0. Prenadamedia Group.